

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Rika Dwi Cahyani,**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul Ulum, Indonesia  
Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kabupaten Lamongan,  
Jawa Timur, 62253

Email: [rika.2021@mhs.unisda.ac.id](mailto:rika.2021@mhs.unisda.ac.id)

**Isnaini Anniswati Rosyida**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul Ulum, Indonesia  
Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kabupaten Lamongan,  
Jawa Timur, 62253

Email: [isnaini@unisda.ac.id](mailto:isnaini@unisda.ac.id)

**Have Zulkarnaen**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul Ulum, Indonesia  
Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kabupaten Lamongan,  
Jawa Timur, 62253

Email: [havezulkarnaen@unisda.ac.id](mailto:havezulkarnaen@unisda.ac.id)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas publik, transparansi pelaporan keuangan, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan populasi dan sampel sebanyak 50 responden yang terdiri dari perangkat desa dari 16 desa di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung maupun daring, serta dianalisis menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, transparansi pelaporan keuangan, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pelaporan keuangan. Partisipasi masyarakat memoderasi atau memperkuat hubungan antara transparansi pelaporan keuangan dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan. Namun, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa serta tidak memoderasi atau memperkuat hubungan antara akuntabilitas publik dengan pengelolaan keuangan desa.*

**Kata kunci:** Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia salah satu dampak positif kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia salah satunya ialah kemudahan dalam mengakses informasi baik dalam bentuk pribadi maupun instansi

pemerintahan. Kemudahan di era digitalisasi saat ini merupakan hal yang terus menerus mengalami pembaharuan secara signifikan mulai dari instansi terendah sampai dengan sekelas negara. Salah satu yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) diperuntukan untuk siapa saja dan digunakan apa saja serta bagaimana arus APBN sampai dengan pemerintahan terbawah. Desa merupakan salah satu pemerintah terbawah di dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa mendapatkan dana dalam pengelolaan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan atas APBN. Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari APBN yang digunakan untuk pembangunan desa, penganggaran ini telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan tersebut maka penilaian kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari suatu laporan keuangan yang telah diterapkan oleh perusahaan guna menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang bersangkutan sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Transparansi laporan keuangan desa kepada seluruh lapisan masyarakat desa merupakan hal yang utama sehingga masyarakat dapat mengawasi kemana uang negara digunakan. Transparansi merupakan bentuk *good governance* sebuah perusahaan atau pemerintahan yang berarti memiliki arus informasi yang bebas sehingga dalam prosesnya informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dan organisasi selain sebagai pihak penyelenggara dan pengelolaan organisasi juga memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yaitu memantau serta memahami laporan keuangan dana desa. Rusdiana & Nasihudin (2018) dalam (Zubaidah & Nugraeni, 2023) menjelaskan

bahwa transparansi merupakan sebuah tindakan secara terbuka dengan memberikan laporan keuangan yang benar kepada seluruh masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat juga memiliki keyakinan serta hak untuk mengetahui dan keterbukaan yang komprehensif terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan salah satunya terhadap dana desa maupun sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di wilayah desa tersebut.

Akuntabilitas adalah konsep hubungan timbal balik yang terdiri atas kewajiban seseorang terhadap tanggung jawab dalam setiap tindakan maupun keputusan yang telah diambil. Akuntabilitas sendiri membutuhkan transparansi, kejujuran serta integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga hasil yang diperoleh dapat diukur serta dievaluasi dalam periode selanjutnya salah satunya ialah dalam laporan keuangan. (Sofyani & Tahar, 2021) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki akuntabilitas yang baik berdasarkan atas pemerintahan yang transparan terhadap masyarakatnya. Pihak yang bertanggungjawab (*agent*) memiliki tanggung jawab atas semua tindakan serta aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas (*principal*) serta memiliki hak dan kuasa untuk memberikan tuntutan terhadap pemerintah. Luthans dalam (Prihati, 2022) menjelaskan bahwa komitmen merupakan sebuah sikap manusia yang mencerminkan loyalitas karyawan terhadap sebuah organisasi yang sedang mereka ikuti serta memiliki proses yang berkelanjutan dimana para peserta memberikan apresiasi berupa memberikan sikap kepedulian terhadap kesuksesan serta kesejahteraan bagi perusahaan dan karyawan. Sedangkan pada sumber lain yaitu Yusuf (2017) dalam (Prihati, 2022) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu proses suatu keadaan yang mana seorang karyawan atau anggota organisasi memihak suatu organisasi tertentu yang nantinya memiliki suatu tujuan serta keinginannya

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Dengan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menghasilkan kebaruan. Sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya meneliti hubungan langsung tanpa mempertimbangkan pengaruh partisipasi masyarakat sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Tiga elemen penting tata kelola keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi, digabungkan dalam satu model penelitian ini, yang jarang dilakukan secara bersamaan dalam konteks desa. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam literatur keuangan publik, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pemerintahan desa, yang selama ini kurang dipelajari secara menyeluruh oleh penelitian akademik di Indonesia.

## II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan teori *agency* dan *stewardship* namun gagal menguji aspek psikologis dan situasional yang dapat menjadi pondasi teori *stewardship*. Riset sebelumnya kelihatan didasari satu pemikiran, yakni teori *stewardship* adalah benar dan teori *agency* salah (Olson & Wu, 2022).

### Teori *Good Governance*

*Good Governance* mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini

dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul Tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pun masih belum menemukan pemaham yang baik mengenai apa itu *good governance* sehingga dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan *good governance* sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan (Handayani & Nur, 2019). Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), *good governance* mencakup aspek-aspek seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Tata kelola yang baik tidak hanya berlaku di sektor pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (Mulanda & Adnan, 2023).

### Teori *Agency* (*Agency Theory*)

Teori *Agency* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori *Agency* adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara pemberi kontrak atau prinsipal dan penerima kontrak atau agen, aktivitas tersebut berisikan prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan dan tujuan prinsipal serta melalui aktivitas tersebut prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan guna mencapai tujuan secara bersama. Agen memiliki tanggung jawab kepada prinsipal untuk mencapai tujuan prinsipal, dan agen akan menerima kompensasi dari prinsipal. Semakin tinggi pencapaian tujuan prinsipal, semakin tinggi pula imbalan yang akan diterima agen. Dalam suatu perusahaan yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan agen yaitu manajemen perusahaan. Namun pada organisasi yang berhubungan dengan pemerintahan sejenis desa

prinsipial memiliki artian ialah R sedangkan agen memiliki artian rakyat (Nabila, 2022).

### **Pengembangan Hipotesis**

Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan, yang menuntut adanya transparansi, pelaporan tepat waktu, serta keterbukaan informasi. Putra et al. (2022) menegaskan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, sejalan dengan Yulianti dan Sari (2021) yang menyatakan akuntabilitas publik meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu diajukan hipotesis pertama (H1) bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, transparansi laporan keuangan desa menjadi dasar kepercayaan publik serta pencegah penyalahgunaan dana. Wahyuni (2020) menemukan bahwa transparansi meningkatkan kualitas keputusan desa, sedangkan Kurniawan et al. (2021) menegaskan dampaknya terhadap efisiensi penggunaan dana. Maka, hipotesis kedua (H2) diajukan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Komitmen organisasi juga penting dalam memastikan profesionalisme dan kepatuhan perangkat desa. Santosa (2022) menyatakan komitmen membentuk budaya kerja disiplin, diperkuat oleh temuan Anindita dan Ramli (2023) bahwa komitmen meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa karena mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Sari (2022) menunjukkan bahwa partisipasi signifikan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana. Maka, hipotesis keempat (H4) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Lebih

lanjut, partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai variabel moderasi. Penelitian Rohma (2025) membuktikan partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas publik, meskipun berbeda dengan Ristiana (2022) yang menyatakan tidak ada efek moderasi. Hal ini mendasari hipotesis kelima (H5) bahwa partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Demikian pula, Yulia (2021) menemukan partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh transparansi laporan keuangan melalui mekanisme pengawasan desa, sehingga diajukan hipotesis keenam (H6). Terakhir, penelitian Putra dan Agustin (2023) menegaskan partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh komitmen organisasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga dirumuskan hipotesis ketujuh (H7).

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel melalui data yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Sesuai dengan pendekatan ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan terstruktur dan diberikan skor sesuai skala Likert. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik (X1), transparansi laporan keuangan (X2), dan komitmen organisasi (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan partisipasi masyarakat (M) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri atas sekretaris, bendahara serta kepala desa yang tersebar pada 16 desa di kecamatan widang sebesar 50 responden. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan pada teknik *purposive* sampling yaitu menggunakan sampel jenuh sehingga didapatkan 50 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SEM-PLS yang terdiri atas uji

inner model, Uji Outermode serta Pengujian hipotesis yaitu pengujian moderasi.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini memiliki 3 variabel bebas yang terdiri atas Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Laporan Keuangan (X2) dan Komitmen Organisasi (X3), Partisipasi Masyarakat sebagai variabel Moderasi (M), dan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel terikat (Y). Hasil pengujian analisis deskriptif statistik dalam penelitian ini dapat disajikan dan diperhatikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Name	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
X1.1	1	5	3,58	0,928
X1.2	2	5	3,60	0,857
X1.3	2	5	3,64	0,875
X1.4	1	5	3,60	0,904
X1.5	1	5	3,58	0,950
X1.6	1	5	3,64	0,875
X1.7	1	5	3,70	0,863
X1.8	1	5	3,66	0,872
X2.1	1	5	3,50	0,974
X2.2	1	5	3,48	1,015
X2.3	1	5	3,52	0,909
X2.4	1	5	3,44	0,929
X2.5	1	5	3,50	0,886
X2.6	1	5	3,42	0,950
X2.7	1	5	3,46	0,930
X2.8	1	5	3,40	0,857
X2.9	1	5	3,44	0,907
X3.1	1	5	3,46	0,930
X3.2	1	5	3,48	0,931
X3.3	1	5	3,50	0,909
X3.4	1	5	3,50	0,909
X3.5	1	5	3,54	0,908
X3.6	1	5	3,46	0,930
Z1.1	1	5	3,44	1,013
Z1.2	1	5	3,42	0,992
Z1.3	1	5	3,40	0,948
Z1.4	1	5	3,42	0,992
Z1.5	1	5	3,48	0,953
Z1.6	1	5	3,46	1,014
Z1.7	1	5	3,44	1,013
Y1.1	1	5	3,46	1,014
Y1.2	1	5	3,54	0,952
Y1.3	1	5	3,52	0,931
Y1.4	1	5	3,52	0,953
Y1.5	1	5	3,54	0,908
Y1.6	1	5	3,46	0,908

Name	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Y1.7	1	5	3,50	0,931
Y1.8	1	5	3,48	0,931
Y1.9	1	5	3,52	0,974
Y1.10	1	5	3,52	0,909
Y1.11	1	5	3,52	0,886
Y1.12	1	5	3,54	0,930
Y1.13	1	5	3,56	0,929
Y1.14	1	5	3,52	0,953
Y1.15	1	5	3,58	0,950
Y1.16	1	5	3,56	0,951
Y1.17	1	5	3,58	0,971

Sumber: Data primer diolah 2025.

Berdasarkan pada tabel 4.6 Menjelaskan bahwa secara keseluruhan setiap item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Laporan Keuangan (X2), Komitmen Organisasi (X3) mempunyai nilai maksimum 5 (sangat setuju) dan nilai minimum 1 (sangat tidak setuju), kecuali pada pernyataan X1.2 dan X1.3, yang memiliki nilai minimum 2 (tidak setuju).

Kemudian untuk nilai mean dari keseluruhan jawaban responden atas item pertanyaan variabel X1 berada pada rentang 3,58 hingga 3,70. Nilai mean variabel X2 berada pada 3,42 hingga 3,52. Nilai mean variabel X3 berada pada rentang 3,46 hingga 3,50. Nilai mean variabel Z berada pada 3,40 hingga 3,48 dan nilai mean pada variabel Y berada pada 3,46 hingga 3,58. Nilai standar deviasi untuk keseluruhan item pernyataan tiap variabel berada dibawah nilai mean yang artinya kualitas data untuk variabel pada penelitian ini baik.

**a. Hasil Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity)**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrument atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. *Convergent validity* adalah mengukur validitas indikator refleksi sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari *outer loading* dari masing-masing indikator variabel. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai *outer loadings* > 0,70, sedangkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50 (Chin & Todd, 1995).

Tabel 4. 2 Hasil Uji Outer Loading

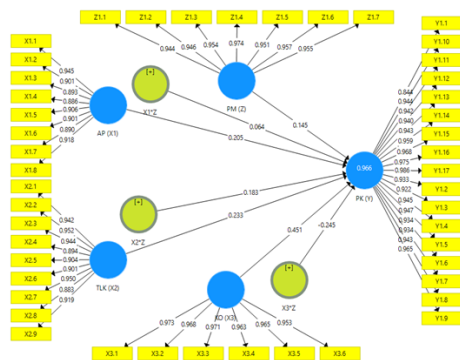
	Akuntabilitas Publik (X1)	Transparansi Laporan Keuangan (X2)	Komitmen Organisasi (X3)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (Z)	Ket .
X 1. 1	0,945					Valid
X 1. 2	0,901					Valid
X 1. 3	0,893					Valid
X 1. 4	0,886					Valid
X 1. 5	0,906					Valid
X 1. 6	0,901					Valid
X 1. 7	0,890					Valid
X 1. 8	0,918					Valid
X 2. 1		0,942				Valid
X 2. 2		0,952				Valid
X 2. 3		0,944				Valid
X 2. 4		0,894				Valid
X 2. 5		0,904				Valid
X 2. 6		0,901				Valid
X 2. 7		0,950				Valid
X 2. 8		0,883				Valid
X 2. 9		0,919				Valid
X 3. 1			0,973			Valid

	Akuntabilitas Publik (X1)	Transparansi Laporan Keuangan (X2)	Komitmen Organisasi (X3)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (Z)	Ket .
X 3. 2			0,968			Valid
X 3. 3			0,971			Valid
X 3. 4			0,963			Valid
X 3. 5			0,965			Valid
X 3. 6			0,953			Valid
Y 1. 1				0,844		Valid
Y 1. 10				0,944		Valid
Y 1. 11				0,942		Valid
Y 1. 12				0,940		Valid
Y 1. 13				0,943		Valid
Y 1. 14				0,959		Valid
Y 1. 15				0,968		Valid
Y 1. 16				0,975		Valid
Y 1. 17				0,986		Valid
Y 1. 2				0,933		Valid
Y 1. 3				0,922		Valid
Y 1. 4				0,945		Valid
Y 1. 5				0,947		Valid
Y 1. 6				0,934		Valid

	Akuntabilitas Publik (X1)	Transparansi Laporan Keuangan (X2)	Komitmen Organisasi (X3)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (Z)	Ket.
Y 1.7				0,934		Valid
Y 1.8				0,943		Valid
Y 1.9				0,965		Valid
Z 1.1					0,944	Valid
Z 1.2					0,946	Valid
Z 1.3					0,954	Valid
Z 1.4					0,974	Valid
Z 1.5					0,951	Valid
Z 1.6					0,957	Valid
Z 1.7					0,955	Valid

Sumber: Data Hasil SmartPLS 2025

Gambar 4.1 Diagram Loading Faktor



Sumber: Data Hasil SmartPLS 2025

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* pada seluruh variabel penelitian telah memenuhi syarat yang telah disarankan yaitu lebih dari 0,7. Dalam tabel

tersebut juga menunjukkan bahwa nilai terendah pada uji validitas konvergen 0,883 terletak pada variabel Transparansi Laporan Keuangan dan nilai tertinggi 0,975 terletak pada variabel Pengelolaan Dana Desa. Data tersebut telah diolah secara valid sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk *kritericonvergent validity*.

**b. Hasil Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)**

*Discriminant Validity* merupakan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok tersebut lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya.

Tabel 4.3 Hasil Uji Cross Loading

	Akuntabilitas Publik (X1)	Transparansi Laporan Keuangan (X2)	Komitmen Organisasi (X3)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (Z)
X1.1	0,945	0,780	0,755	0,843	0,750
X1.2	0,901	0,720	0,723	0,801	0,715
X1.3	0,893	0,665	0,683	0,768	0,650
X1.4	0,886	0,691	0,741	0,816	0,732
X1.5	0,906	0,709	0,725	0,841	0,772
X1.6	0,901	0,786	0,740	0,829	0,770
X1.7	0,890	0,742	0,653	0,753	0,673
X1.8	0,918	0,684	0,672	0,778	0,687
X2.1	0,767	0,942	0,777	0,886	0,791
X2.2	0,774	0,952	0,779	0,884	0,802
X2.3	0,791	0,944	0,744	0,862	0,797
X2.4	0,736	0,894	0,677	0,764	0,694
X2.5	0,671	0,904	0,646	0,735	0,675
X2.6	0,641	0,901	0,626	0,723	0,660
X2.7	0,752	0,950	0,776	0,864	0,772
X2.8	0,702	0,883	0,761	0,806	0,724
X2.9	0,765	0,919	0,817	0,873	0,786
X3.1	0,783	0,802	0,973	0,908	0,845
X3.2	0,765	0,783	0,968	0,896	0,831

	Akuntabilitas Publik (X1)	Transparansi Laporan Keuangan (X2)	Komitmen Organisasi (X3)	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Partisipasi Masyarakat (Z)
X3.3	0,738	0,750	0,971	0,867	0,793
X3.4	0,742	0,750	0,963	0,874	0,888
X3.5	0,767	0,776	0,965	0,896	0,865
X3.6	0,762	0,773	0,953	0,896	0,865
Y1.1	0,752	0,751	0,836	0,844	0,951
Y1.10	0,867	0,815	0,841	0,944	0,848
Y1.11	0,854	0,818	0,832	0,942	0,838
Y1.12	0,844	0,813	0,843	0,940	0,842
Y1.13	0,838	0,828	0,856	0,943	0,802
Y1.14	0,874	0,842	0,875	0,959	0,825
Y1.15	0,863	0,860	0,879	0,968	0,860
Y1.16	0,875	0,870	0,881	0,975	0,868
Y1.17	0,884	0,890	0,899	0,986	0,886
Y1.2	0,811	0,848	0,928	0,933	0,874
Y1.3	0,792	0,856	0,899	0,922	0,874
Y1.4	0,831	0,876	0,843	0,945	0,851
Y1.5	0,833	0,875	0,884	0,947	0,855
Y1.6	0,792	0,862	0,833	0,934	0,812
Y1.7	0,806	0,846	0,878	0,934	0,815
Y1.8	0,843	0,854	0,870	0,943	0,825
Y1.9	0,884	0,851	0,895	0,965	0,896
Z1.1	0,794	0,812	0,863	0,918	0,944
Z1.2	0,763	0,761	0,843	0,868	0,946
Z1.3	0,719	0,754	0,809	0,822	0,954
Z1.4	0,773	0,792	0,843	0,881	0,974
Z1.5	0,761	0,772	0,814	0,859	0,951
Z1.6	0,762	0,774	0,847	0,858	0,957
Z1.7	0,738	0,752	0,844	0,842	0,955

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *cross loading* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *cross loading* kepada konstruk lain. Dari Tabel 4.13 dinyatakan bahwa nilai variabel menunjukkan bahwa *cross loading* mulai variabel Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi

Laporan Keuangan (X2), Komitmen Organisasi (X3), Partisipasi Masyarakat (Z) dan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dari variabel tersebut melebihi nilai indikator lainnya kepada konstruk yang lain. Dengan demikian, variabel X1, X2, X3, Z dan Y dinyatakan valid. Selain itu nilai average variance inflation factor (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (Raya, 2022). Berikut adalah hasil dari average variance inflation factor (AVE) diuraikan pada Tabel 4.14:

Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Publik (X1)	0,820
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	0,849
Komitmen Organisasi (X3)	0,932
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,889
Partisipasi Masyarakat (Z)	0,911

Sumber: Data Hasil SmartPLS 2025

Nilai AVE yang diharapkan adalah diatas 0.5 (Ghozal & Latan, 2015). Diketahui bahwa nilai AVE > 0.5 yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai AVE. selanjutnya dilakukan uji reabilitas berdasarkan nilai *composite reability* (CR).

c. Hasil Uji Reliabilitas (*Composite Reability*)

Tabel 4. 5 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	rho-A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Publik (X1)	0,969	0,969	0,973	0,820
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	0,978	0,980	0,981	0,849
Komitmen Organisasi (X3)	0,985	0,989	0,988	0,932

		86		
<b>Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0,992	0,993	0,889	
<b>Partisipasi Masyarakat (Z)</b>	0,984	0,986	0,911	

Sumber: Data Hasil SmartPLS 2025

Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *creliability* harus lebih besar dari 0,7. Pada tabel 4.15 diatas nilai *composite reliability* semua variabel sudah lebih besar dari 0,7 dan nilai *composite reliability* terkecil pada variabel Akuntabilitas Publik (X1) dengan nilai 0,820. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's alpha* > 0,7. Pada tabel diatas disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena lebih besar dari 0,7 dan nilai *Cronbach's alpha* terkecil pada variabel Akuntabilitas Publik (X1) dengan nilai 0,820.

**d. Uji Model Struktural (Inner Model)**

**Koefisien Determinasi (R-Square)**

R-square merupakan uji yang digunakan untuk memperlihatkan seberapa jauh pengaruh antar variabel X dengan variabel Y. Terkait penelitian ini yang menggunakan lebih dari atau varibel eksogen, maka pengukuran koefisien determinasi dilakukan berdasarkan nilai *R-Square adjusted* dengan kriteria yang serupa pada pengukuran *R-Square*. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square*.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji R-Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0,966	0,961

Sumber: Data Hasil SmartPLS 2025

Berdasarkan tabel *R-Square* diatas menunjukkan nilai *R-Square adjusted* sebesar 0,961 atau 96,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Desa dapat dijelaskan oleh variabel independen Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Laporan Keuangan (X2), Komitmen Organisasi (X3) dan Partisipasi Masyarakat (Z) sebesar 96,1% sedangkan sisanya sebesar 3,9%

disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**e. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefisien* pada pengujian inner model. Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai *T-statistik* dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% dengan nilai *T-statistik* yang digunakan adalah 1,96

**Tabel 4. 7 Path Coefisien**

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STD EV)</b>	<b>T Statistics ( O/STD EV )</b>	<b>P-values</b>	<b>Significance</b>
<b>Akuntabilitas Publik (X1) -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.205	0.216	0.091	2.248	0.025	Significant
<b>Transparansi Laporan Keuangan (X2) -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.233	0.230	0.079	2.941	0.003	Significant
<b>Komitmen Organisasi (X3) -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.451	0.435	0.109	4.122	0.000	Significant
<b>Partisipasi Masyarakat (Z) -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.145	0.154	0.090	1.607	0.109	Not Significant
<b>X1*Z -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.064	0.060	0.058	1.102	0.271	Not Significant

<b>X2*Z -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.183	0.156	0.084	2.179	0.030	Signif
<b>X3*Z -&gt; Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>	0.245	0.216	0.082	2.989	0.003	Signif

Sumber: Data Hasil SmartPLS (2025)

**H1: Akuntabilitas Publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,205 > 0,000 dengan *T-statistik* 2,248 > 1,96 dan *P-value* 0,025 < 0,05 maka H1 diterima, artinya variabel Akuntabilitas Publik memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa.

**H2: Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,233 > 0,000 dengan *T-statistik* 2,941 > 1,96 dan *P-value* 0,003 < 0,05 maka H2 diterima, artinya variabel Transparansi Laporan Keuangan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa.

**H3: Komitmen Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,451 > 0,000 dengan *T-statistik* 4,122 > 1,96 dan *P-value* 0,000 < 0,05 maka H3 diterima, artinya variabel Komitmen Organisasi memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa.

**H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan**

**signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,145 > 0,000 dengan *T-statistik* 1,607 < 1,96 dan *P-value* 0,109 > 0,05 maka H4 ditolak, artinya variabel Partisipasi Masyarakat tidak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa.

**H5: Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,064 > 0,000 dengan *T-statistik* 1,102 < 1,96 dan *P-value* 0,271 > 0,05 maka H1 diterima, artinya variabel Partisipasi Masyarakat tidak memberikan hubungan positif dan menguatkan akan pengaruhnya akuntabilitas publik terhadap pengelolaan Keuangan Desa.

**H6: Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,183 > 0,000 dengan *T-statistik* 2,179 > 1,96 dan *P-value* 0.030 < 0.05 maka H6 diterima, artinya variabel Partisipasi Masyarakat memberi hubungan yang positif dan menguatkan atas pengaruhnya tranparansi laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa.

**H7: Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil analisa pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Original Sampel (Koefisien) sebesar 0,205 > 0,000 dengan *T-statistik* 2,248 > 1,96 dan *P-value* 0.025 < 0.05 maka H7 diterima, artinya variabel Partisipasi Masyarakat memberi hubungan yang positif dan menguatkan atas

pengaruhnya komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### IV. PEMBAHASAN

##### a. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis 1 dilihat bahwa nilai *P-value* 0,025 hasil ini menunjukkan Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, maka hal ini menunjukkan H1 diterima. Pada nilai koefisien menunjukkan angka 0,205 berarti jika seseorang aparatur desa atau perangkat desa memiliki Akuntabilitas Publik yang lebih tinggi, maka pandangan publik akan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pada Dana Desa juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang aparatur desa yang memiliki Akuntabilitas publik yang tinggi serta paham akan tanggung jawab dalam pekerjaannya maka pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa akan menjadi baik, masyarakat tidak akan memberikan dampak negative terhadap perangkat desa atas pengelolaan dana tersebut karena akuntabilitas perangkat desa yang baik. Namun jika seorang perangkat desa tidak memiliki akuntabilitas publik yang tinggi maka masyarakat akan memiliki pemikiran negative terkait pengelolaan keuangan desa sudah tepat sasaran atau sesuai dengan anggaran desa yang telah ditetapkan. Perangkat desa atau aparatur Desa yang memiliki akuntabilitas tinggi cenderung akan memiliki tanggung jawab atas pemerintah dan tugas yang diembannya saat menjabat. Selain itu perangkat desa dengan akuntabilitas yang tinggi senantiasa selalu memberikan transparansi atas apa yang telah mereka kerjakan sehingga tidak ada keraguan akan penggunaan fasilitas desa salah satunya yaitu keuangan. Hal ini sejalan dengan Putra et al. (2022), Yulianti dan Sari (2021), Siti Rohma et.al (2025) , dan Ristiana (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

##### b. Pengaruh Tranparansi Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis 2 dilihat bahwa nilai *P-value* 0,003 hasil ini menunjukkan Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti H2 diterima. Pada nilai koefisien menunjukkan angka 0,233 berarti jika seseorang memiliki tanggung jawab dalam Transparansi Laporan Keuangan yang lebih tinggi, maka pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,233. Perangkat desa yang memiliki tanggung jawab akan transparansi laporan keuangan yang tinggi akan beranggapan bahwa masyarakat perlu mengetahui penggunaan dana desa telah sesuai dengan anggaran desa yang telah ditentukan atau belum. Namun, jika seorang perangkat desa tidak memiliki tanggung jawab akan transparansi laporan keuangan atau rendahnya akan sikap tersebut maka pengelolaan keuangan desa tersebut dikatakan belum baik sehingga masyarakat akan menjadi ragu dana desa telah dipergunakan sebagai mestinya atau justru diselewengkan. Transparansi laporan keuangan memang seharusnya dilakukan oleh pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan maupun bisnis yang sudah bergerak secara masal. Salah satunya dalam pemerintahan desa, transparansi laporan keuangan sangat diperlukan oleh setiap orang mulai dari kepala desa sampai dengan perangkat desa serta badan-badan terkait agar masyarakat memberikan dampak yaitu kepercayaan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa. Jika seorang perangkat desa memiliki tanggung jawab serta transparansi laporan keuangan atas setiap aktivitas atau proyek yang telah dilaksanakan maka masyarakat percaya akan kinerja perangkat desa untuk masyarakat di desanya. Hal ini sejalan dengan Wahyuni (2020), Kurniawan et al. (2021), Siti Rohma et.al (2025), Elisa Rahma Yanti, Wiralestari (2023) , dan

Ristiana (2025) yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

**c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil pengujian hipotesis 3 dilihat bahwa nilai *P-value* 0,000 hasil ini menunjukkan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti H3 diterima. Pada nilai koefisien menunjukkan angka 0,451 berarti jika seseorang memiliki Komitmen Organisasi yang tinggi, maka perangkat Desa atau aparatur Desa akan memiliki komitmen kepada organisasi dalam pengelolaan keuangan Desa akan meningkat sebesar 0,451. Perangkat desa atau aparatur desa dengan komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi salah satunya siap bekerja lembur serta kedisiplinan dalam bekerja sehingga dapat menciptakan budaya yang kerja efektif serta efisien. Semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh perangkat desa maka semakin tinggi etos kerja yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan Santosa (2022), Anindita & Ramli (2023), I Ketut Jati et.al (2023), Siti Rohma et.al (2025), dan Jennifer & Lamria Sagala (2025) yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi memiliki pengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

**d. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil pengujian hipotesis 4 dilihat bahwa nilai *P-value* 0,145 hasil ini menunjukkan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti H4 ditolak. Hasil analisis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara masyarakat ikut berpartisipasi maupun tidak berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Setiap

masyarakat memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain ada yang memiliki pemikiran kritis akan pemerintahan desa mereka bahkan ada yang merasa tidak ada perbedaan dan masalah di desa mereka. Namun biasanya sikap seperti itu membuat kinerja perangkat desa menjadikan kurang tepat sasaran sebagai pelayanan publik sehingga memerlukan kritik serta pengawasan yang pasti. pelaporan laporan keuangan biasanya disusun oleh pemerintah desa kemudian di publikasikan untuk masyarakat ketahui bersama penggunaan dana desa pada periode tersebut digunakan untuk apa saja selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam setiap proses pelaksanaan musyawarah desa. Jika pengawasan yang signifikan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi akan memberikan dampak yang positif yaitu ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan namun dalam beberapa hal partisipasi yang dilakukan masyarakat tidak memiliki dampak terhadap perubahan desa terutama dalam penyusunan laporan keuangan karena aktivitas tersebut biasanya dilakukan oleh internal organisasi pemerintah yang memahami akan regulasi penyusunan laporan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Alpi (2023), Yasir & Munawaroh (2023) dan Defi & Alpi (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

**e. Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji moderasi berdasarkan nilai *path Coeficient* pada tabel 4.17 mnejelaskan bahwa antara partisipasi masyarakat (Z) dengan pengaruhnya akuntabilitas publik (X1) terhadap pengelolaan keuangan Desa tidak memoderasi atau memberikan kelemahan satu sama lain, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *P-value* 0,271 dan nilai

koefisien sebesar 0,064 maka dalam hal ini hipotesis 5 dinyatakan ditolak. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan akuntabilitas publik perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak memiliki hubungan yang kuat sehingga akuntabilitas yang dimiliki perangkat desa atas pengelolaan keuangan akan *stag* diposisi yang sama namun lambat laun akan mengalami perubahan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini mengimplikasikan bahwa bahwa masyarakat desa yang memiliki keterlibatan terhadap pengawasan maupun memiliki pemikiran kritis terhadap pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yang dimiliki oleh perangkat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan khususnya pada dana desa dapat memberikan kritikan serta menyoroti kepada pemerintah jika terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat memungkinkan tidak secara langsung dapat mengatur akuntabilitas dalam sebuah organisasi selain itu keterlibatan masyarakat dalam penhelolaan keuangan desa dapat memberikan peluang yang besar dalam membentuk serta memperkuat potensi akuntabilitas publik yang dimiliki oleh perangkat desa dengan cara pemantauan, pengawasan maupun tekanan dari publik salah satunya adalah masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Siti Rohma et.al (2025), Ristiana (2022) dan I Ketut Jati et.al (2023) yang menyatakan bahwa prtisipasi masyarakat tidak memiliki hubungan menguatkan atas pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

**f. Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji moderasi berdasarkan nilai *path Coeficient* pada tabel 4.15 mnejelaskan bahwa antara partisipasi masyarakat (Z) dengan pengaruhnya

Transparansi Laporan Keuangan (X2) terhadap pengelolaan keuangan Desa (Y) memoderasi satu sama lain, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *P-value* 0,030 dan nilai koefisien sebesar 0,183 maka dalam hal ini hipotesis 6 dinyatakan diterima. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang dapat memberikan dorongan terhadap pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap pengelolaan laporan keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan khususnya pada dana desa akan memberikan dampak positif kepada perangkat desa dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang kemudian akan di publikasikan kepada masyarakat luas hal tersebut dapat memberikan efek kehati-hatian dalam penggunaan keuangan khususnya dana desa sehingga jika terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana desa maupun pengelolaan keuangan. keterlibatan masyarakat dalam memperoleh transparansi pengelolaan laporan keuangan juga dapat meningkatkan integritas perangkat desa sehingga dapat secara terbuka dan gamblang dalam melaporkan keuangan khususnya dana desa. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2021), Siti Rohmah et.al (2025), Elisa Rahma & Wiralestari, (2023), Kukuh Iqnatul Pribadi et.al (2025), dan Putra Adi Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi mmasyarakat memiliki hubungan yang menguatkan atas pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa.

**g. Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji modaerasi berdasarkan nilai *path Coeficient* pada tabel 4.17 menjelaskan bahwa antara partisipasi masyarakat (Z) dengan pengaruhnya Komitmen Organisasi (X3) terhadap pengelolaan keuangan Desa (Y) memoderasi satu sama lain, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *P-value* 0,003 dan nilai koefisien sebesar -0,245 maka dalam

hal ini hipotesis 7 dinyatakan diterima. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang dapat memberikan dorongan terhadap pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pengelolaan laporan keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa khususnya pada dana desa merupakan salah satu bentuk dorongan yang positif kepada organisasi sehingga setiap perangkat desa maupun kepala desa memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi sehingga dapat mempertahankan akuntabilitas publik yang dimiliki oleh personal aparatur desa serta menjaga kestabilan dalam pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh desa. Sebagai masyarakat patutlah memiliki pemikiran yang kritis dan mampu mengawasi atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab atas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Agustin (2023), Kukuh Iqnatul Pribadi et.al (2025), Siti Rohma et.al (2025), Putra Adi Kurniawan (2020) dan Satriawan & Dewi (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang menguatkan atas pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas publik yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.
2. Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti semakin transparan laporan keuangan desa, maka semakin baik

pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen organisasi perangkat desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa.
4. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti meskipun partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, namun pengaruh tersebut tidak signifikan.
5. Partisipasi Masyarakat tidak memoderasi pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
6. Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin kuat.
7. Partisipasi Masyarakat memoderasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, nilai koefisien moderasi negatif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memperlemah pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa. keterbatasan sampel kecil dan satu kecamatan, potensi common method bias, dan peneliti menyarankan desain longitudinal atau multi-sumber (dokumen APBDes, audit) untuk validasi temuan.

## VI. REFERENSI

- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Alpi, D. P. & M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola

- Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 5(1), 1–10.
- Amrulloh, A., & Amalia, A. D. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 167. <https://doi.org/10.36080/jak.v9i2.1421>
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2023). Sustainable Jurnal Akuntansi. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 3(2), 282–300.
- Dawud, J., Ramdani, D. F., & Abubakar, R. R. T. (2021). Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 24. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.683>
- Defi Purnamawati Saragih & M. Firza Alpi. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1).
- Dewi, G. M. I. S. & G. A. K. R. S. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 1–11.
- Elisa Rahma Yanti, Wiralestari, W. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(1), 53–64.
- Farika, L., Albahi, M., & Saleh, mawardi muhammad. (2023). Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 1017–1030.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Hadi, A., & Raharjo, I. B. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Bermasalah*. 8(1).
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- I Ketut Jati, Anak Agung Ngurah Bagus Dwiranda, Ni Luh Sari Widhiyani, A. A. N. A. K. (2023). Kompetensi paratur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komiten Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Unud*.
- IRMA, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.a.v13i1.341>
- Jennifer, Lamria Sagala, D. R. S. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Di Kecamatan

- Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(1).
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of The Firm : Manajement Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure. *Journal FOf Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kharisma, B. (2019). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 11. <https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>
- Kurniawan, P. A. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Kurniawansyah, D. (2018). Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi ; Pendekatan Positivist Dan Principle-Agen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2), 435–446. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122>
- Kushandajani. (2022). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- L. Donaldson., & J. H. D. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory CEO gOVERNANCE AND sHAREHOLDER rETRUNS. *Australian Journal Of Manajemen*, 16, 49–64.
- Liana, L. (2020). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Dinamik*, 14(2), 90–97.
- Maria, S. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*, 1.
- Muhammad Yasir & Wilda Sri Munawaroh. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Studi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1).
- Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). IMPLEMENTASI TEORI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK.
- Nabila, T. F. (2023). Penngaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan*, 3(1), 23–26.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2022). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. *Enterprise Risk Management*, 31–41. [https://doi.org/10.1142/9789814632775\\_0003](https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003)
- Ristiana. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare Kecamatan Ampelgadng Kabupaten Pemalang). *Skripsi UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan*.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance Bagian Kedua*. Cv Mandar Maju.
- Siti Rohma, Martinus Robert, Pantas P. Parde, Nadiya Yunan, Diana Siang, R. H. (2025). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Geoekonomi*, 16(1), 161–172.

- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiono. (2004). Konsep, identifikasi, alat analisis dan masalah penggunaan variabel moderator. *Studi Manajemen & Organisasi*, 1(2), 61–70.
- Wardhana, A. (2024). *Operasionalisasi variabel dalam penelitian kuantitatif* (Issue July).
- Wicaksono, K. W. (2021). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>